

OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMPERCEPAT *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN INVESTASI DI PAPUA***OPTIMIZING INFORMATION TECHNOLOGY TO ACCELERATE GOOD GOVERNANCE IN INVESTMENT SERVICES IN PAPUA*****Muhammad Sawir¹**

Universitas Yapis

Papua¹

email:

sawirmuhammad103@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana optimalisasi teknologi informasi dapat mempercepat *good governance* dalam pelayanan investasi di Papua. Urgensi penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik guna menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa instansi pemerintah daerah di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi, seperti sistem pelayanan terpadu *online* dan aplikasi monitoring investasi, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan investasi. Teknologi informasi memungkinkan pengurangan waktu proses perizinan, peningkatan transparansi, serta kemudahan akses informasi bagi investor. Dengan sistem ini, investor dapat mengajukan izin secara lebih efisien, memonitor perkembangan investasinya secara real-time, dan mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa optimalisasi teknologi informasi sangat efektif dalam mempercepat *good governance* di Papua, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, *Good governance*, Pelayanan Investasi.

Abstract: This study aims to explore how the optimization of information technology can accelerate good governance in investment services in Papua. The urgency of this research is based on the need to improve transparency, efficiency, and accountability in public services to create a more conducive investment environment. The research method used is qualitative analysis with a case study approach in several local government agencies in Papua. The results show that the implementation of information technology, such as online integrated service systems and investment monitoring applications, has positively impacted the quality of investment services. Information technology enables the reduction of licensing process times, increased transparency, and easier access to information for investors. With this system, investors can apply for permits more efficiently, monitor their investment developments in real-time, and obtain the necessary information quickly and accurately. The conclusion of this study is that the optimization of information technology is very effective in accelerating good governance in Papua, thereby attracting more investment and promoting regional economic growth. This study recommends strengthening information technology infrastructure and enhancing human resource capacity as further steps to ensure the sustainability and effectiveness of this program.

Keywords: Information Technology, *Good governance*, Investment Services.

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 4, No. 2, pp. 30-41

Maret 2024

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia**PENDAHULUAN**

Papua, provinsi di ujung timur Indonesia, menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang melimpah menjadikannya daerah yang menarik bagi investor (West, 2023). Namun, proses investasi di Papua masih terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah birokrasi yang rumit dan pelayanan investasi yang kurang optimal (Dwivedi et. al., 2019).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua sektor, termasuk dalam pelayanan investasi (Layne & Lee, 2021). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI). TI diyakini dapat mempercepat proses pelayanan investasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan investor.

Papua merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk menarik investasi, terutama di sektor pertambangan, energi, dan pariwisata. Namun, berbagai tantangan seperti birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik masih menjadi penghambat utama bagi para investor. Oleh karena itu, optimalisasi teknologi informasi menjadi sangat penting untuk mempercepat *good governance* dalam pelayanan investasi di Papua.

Good governance adalah salah satu faktor kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan kondusif. Di Papua, masalah birokrasi yang kompleks dan kurangnya transparansi sering kali menjadi penghalang bagi investasi. Menurut laporan oleh World Bank (2018), negara-negara yang mengimplementasikan *good governance* menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aliran investasi asing langsung (FDI).

Teknologi informasi memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut (Heeks, 2016). Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai contoh, penelitian oleh Norris dan Reddick (2023) menunjukkan bahwa e-governance dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha, yang pada akhirnya menarik lebih banyak investor.

Di Papua, implementasi teknologi informasi dalam pelayanan investasi masih sangat minim. Padahal, menurut studi oleh Tantri (2022), daerah yang menerapkan sistem informasi terpadu dalam pelayanan investasi mampu meningkatkan kepuasan investor dan mempercepat proses perizinan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana optimalisasi teknologi informasi dapat mempercepat *good governance* dalam pelayanan investasi di Papua.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menciptakan sistem pelayanan investasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan studi oleh Rose et al. (2018), penerapan teknologi informasi di sektor publik dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan dengan meminimalisir korupsi dan mempercepat proses administrasi. Selain itu, penelitian oleh Venkatesh (2018) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi manajemen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada penerapan teknologi informasi dalam konteks pelayanan investasi di Papua, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Kebaruan ini terletak pada analisis mendalam mengenai dampak teknologi informasi terhadap percepatan *good governance* di wilayah yang memiliki karakteristik unik seperti Papua.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana optimalisasi teknologi informasi dapat mempercepat *good governance* dalam pelayanan investasi di Papua (Bryman, 2016). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan dinamika yang terlibat dalam implementasi teknologi informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Studi kasus dilakukan pada beberapa instansi pemerintah daerah di Papua yang memiliki peran penting dalam pelayanan investasi.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan pejabat pemerintah, staf IT, serta investor yang berinteraksi langsung dengan sistem pelayanan investasi. Observasi partisipatif

dilakukan untuk memahami proses kerja sehari-hari di instansi terkait dan untuk melihat langsung implementasi teknologi informasi. Analisis dokumen melibatkan peninjauan dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan data statistik terkait pelayanan investasi dan penggunaan teknologi informasi (Merriam & Tisdell, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik (Flick, 2018), yang melibatkan pengkodean data, pengidentifikasian tema utama, dan interpretasi tema-tema tersebut dalam konteks penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data secara sistematis dan mengidentifikasi tema-tema yang berulang yang menggambarkan pengaruh teknologi informasi terhadap *good governance* dalam pelayanan investasi.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi data (Marshall & Rossman, 2016). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen) untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, member checking dilakukan dengan meminta responden untuk meninjau dan memberikan umpan balik terhadap hasil wawancara dan interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika dengan memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela, dan kerahasiaan informasi responden dijaga dengan baik. Setiap partisipan diberi penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian dan diberi kesempatan untuk memberikan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi dalam wawancara atau observasi.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait optimalisasi teknologi informasi untuk mempercepat *good governance* dalam pelayanan investasi di Papua. Temuan-temuan ini didasarkan pada analisis kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen pada beberapa instansi pemerintah daerah di Papua. Berikut adalah hasil-hasil utama penelitian ini:

Serba-Serbi Investasi di Papua

Penelitian ini mengungkap beberapa kendala dalam implementasi teknologi informasi untuk mempercepat *good governance* dalam pelayanan investasi di Papua. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah Papua. Sebagian daerah masih mengalami keterbatasan akses internet yang memadai, yang memperlambat proses penerbitan izin dan aksesibilitas informasi bagi investor.

Berikut adalah data lebih lengkap mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi teknologi informasi untuk mempercepat *good governance* dalam pelayanan investasi di Papua:

a. Infrastruktur teknologi informasi yang terbatas

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di Papua. Beberapa daerah, terutama yang terpencil, menghadapi masalah aksesibilitas internet yang lambat atau tidak stabil. Hal ini mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan sistem pelayanan online secara efektif, seperti pengajuan perizinan investasi secara elektronik atau aplikasi monitoring investasi yang membutuhkan koneksi internet yang handal.

b. Kekurangan sumber daya manusia yang terlatih

Implementasi teknologi informasi yang berhasil memerlukan sumber daya manusia

yang terlatih dengan baik dalam manajemen teknologi informasi dan keamanan data. Namun, banyak pemerintah daerah di Papua menghadapi tantangan dalam menemukan atau melatih SDM yang memiliki keterampilan ini. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT dapat menghambat kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem teknologi informasi yang ada.

c. Regulasi yang tidak selaras atau mendukung

Beberapa regulasi yang berlaku mungkin belum sepenuhnya mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan investasi. Hal ini bisa mencakup ketidakjelasan dalam prosedur penggunaan teknologi informasi untuk administrasi pemerintah daerah, atau aturan yang tidak memungkinkan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi baru dengan cepat dan efektif.

d. Ketidakamanan data dan privasi

Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi merupakan kekhawatiran utama dalam penggunaan teknologi informasi. Kurangnya infrastruktur keamanan yang memadai dan kesadaran akan pentingnya privasi data dapat menjadi penghalang serius dalam adopsi teknologi informasi yang lebih maju.

e. Keterbatasan anggaran

Implementasi dan pemeliharaan sistem teknologi informasi sering kali memerlukan investasi finansial yang signifikan. Pemerintah daerah di Papua mungkin menghadapi keterbatasan anggaran yang membatasi kemampuan untuk mengembangkan infrastruktur IT yang diperlukan atau untuk melatih SDM dalam manajemen teknologi informasi.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur jaringan internet, pelatihan intensif untuk pegawai pemerintah dalam manajemen teknologi informasi, revisi

regulasi untuk mendukung adaptasi teknologi, peningkatan kesadaran akan keamanan data, serta alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan teknologi informasi di Papua. Dengan mengatasi kendala ini, diharapkan pelayanan investasi di Papua dapat meningkat secara signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan investasi juga menjadi hambatan. Beberapa aturan mungkin masih memerlukan revisi atau klarifikasi untuk memastikan bahwa teknologi informasi dapat diintegrasikan secara optimal dalam proses administratif pemerintah daerah. Solusi untuk kendala ini termasuk perluasan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil dan perbaikan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi informasi secara efektif.

Dalam konteks ini, beberapa daerah di Papua telah memulai langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi mereka. Misalnya, program pengembangan akses internet di daerah pedesaan dan penggunaan teknologi satelit untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas cakupan layanan teknologi informasi di seluruh Papua.

Regulasi yang mendukung juga perlu diperkuat melalui dialog terbuka antara pemerintah daerah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Revisi atau pembuatan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dapat membantu mengatasi hambatan administratif yang sering kali terkait dengan implementasi teknologi baru.

Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah juga merupakan langkah penting dalam memastikan penggunaan teknologi informasi yang efektif. Pelatihan yang terarah

tentang manajemen teknologi informasi, keamanan data, dan integrasi sistem dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan investasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, kendala infrastruktur, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam memaksimalkan manfaat teknologi informasi dalam pelayanan investasi di Papua. Dengan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur, mengadaptasi regulasi yang mendukung, dan meningkatkan kapasitas SDM, diharapkan implementasi teknologi informasi dapat berperan lebih efektif dalam mendukung *good governance* dan pertumbuhan ekonomi daerah di Papua secara berkelanjutan.

Peningkatan Efisiensi Proses Perizinan

Implementasi teknologi informasi dalam sektor perizinan telah membawa perubahan yang signifikan dalam efisiensi dan kecepatan proses pengurusan izin investasi. Dengan hadirnya sistem pelayanan terpadu *online*, waktu yang diperlukan untuk memproses izin dapat dipersingkat secara drastis. Jika sebelumnya pengurusan izin bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu, kini proses tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Sistem ini memungkinkan pengajuan dokumen secara elektronik, melakukan verifikasi secara otomatis, dan memfasilitasi komunikasi langsung antara investor dan pejabat terkait. Semua ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses perizinan.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam perizinan juga memberikan transparansi yang lebih baik. Dengan adanya sistem *online*, seluruh proses dan status pengajuan izin dapat dipantau secara real-time oleh para pemohon. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem perizinan, tetapi juga mengurangi potensi korupsi dan praktik-praktik tidak etis

lainnya. Data dari studi yang dilakukan oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi sistem perizinan elektronik mengalami peningkatan investasi asing langsung (FDI) hingga 15% dalam dua tahun pertama implementasi.

Lebih jauh lagi, sistem pelayanan terpadu *online* juga memungkinkan adanya integrasi data antar lembaga pemerintahan yang terlibat dalam proses perizinan. Hal ini meminimalkan duplikasi data dan mempercepat proses verifikasi, karena data yang sudah ada di satu lembaga dapat diakses oleh lembaga lain tanpa perlu pengajuan ulang dari investor. Sebuah penelitian oleh OECD (2019) mengungkapkan bahwa integrasi data antar lembaga pemerintah dapat mengurangi waktu proses perizinan hingga 30%, sekaligus mengurangi biaya administrasi yang harus ditanggung oleh investor.

Untuk mengoptimalkan manfaat dari sistem pelayanan terpadu *online*, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pegawai pemerintah yang bertugas dalam proses perizinan. Pegawai yang terampil dan memahami teknologi informasi akan mampu memanfaatkan sistem ini dengan maksimal, sehingga pelayanan kepada investor dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Studi yang dilakukan oleh *Harvard Business Review* (2021) menyatakan bahwa pelatihan intensif bagi pegawai pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas mereka hingga 25%.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan memastikan sistem yang digunakan selalu *up-to-date* dengan perkembangan teknologi terbaru. Keamanan data juga harus menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efisiensi proses perizinan dapat terus meningkat, menarik lebih banyak

investasi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..

Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik

Penerapan teknologi informasi dalam proses perizinan telah membawa peningkatan signifikan dalam hal transparansi. Sistem perizinan *online* memberikan kemampuan bagi investor untuk memantau status pengajuan mereka secara real-time. Fitur ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi investor, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya korupsi dan praktik tidak etis lainnya. Dengan akses langsung terhadap informasi, investor memiliki kontrol yang lebih baik terhadap proses yang berlangsung, sehingga menumbuhkan kepercayaan pada sistem perizinan yang ada.

Lebih jauh lagi, sistem digital yang diterapkan juga menciptakan jejak audit yang komprehensif. Setiap tindakan yang diambil oleh pejabat terkait dapat direkam dan dilacak, sehingga memungkinkan verifikasi dan evaluasi yang transparan. Jejak audit ini berfungsi sebagai alat pengawasan internal yang efektif, mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat akuntabilitas pejabat. Sebuah studi oleh *Transparency International* (2020) menunjukkan bahwa negara-negara yang mengimplementasikan sistem audit digital mengalami penurunan kasus korupsi hingga 20% dalam lima tahun pertama setelah implementasi.

Selain itu, transparansi yang ditingkatkan melalui teknologi informasi juga berdampak positif pada iklim investasi secara keseluruhan. Ketika investor merasa yakin bahwa proses perizinan berjalan secara adil dan transparan, mereka lebih cenderung untuk melakukan investasi jangka panjang. Penelitian oleh McKinsey & Company (2019) mengungkapkan bahwa adanya sistem perizinan yang transparan dapat meningkatkan minat investasi asing sebesar

10-15%, karena investor merasa lebih aman dan terlindungi dari praktik-praktik korupsi.

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah harus terus memperbarui dan meningkatkan sistem teknologi informasi yang digunakan, sementara sektor swasta dapat memberikan masukan berharga terkait kebutuhan dan ekspektasi mereka. Kemitraan yang solid ini akan memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Sebuah laporan dari *World Economic Forum* (2018) menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan sistem perizinan yang efektif dan transparan.

Di sisi lain, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan investor juga sangat penting. Pemerintah harus aktif mengedukasi tentang cara penggunaan sistem *online* dan manfaat yang ditawarkannya. Dengan pemahaman yang baik, pengguna akan lebih mudah mengadopsi teknologi ini, sehingga tujuan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai secara optimal. Studi dari Harvard Kennedy School (2021) menunjukkan bahwa program sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi pengguna hingga 30%, memperkuat efektivitas sistem perizinan yang transparan dan akuntabel.

Kemudahan Akses Informasi

Penerapan sistem informasi berbasis web telah menghadirkan kemudahan akses yang luar biasa bagi para investor dalam memperoleh informasi terkait kebijakan, prosedur, dan persyaratan investasi. Platform daring ini memungkinkan investor untuk dengan mudah mengakses data yang mereka butuhkan kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit-belit. Situs web pemerintah daerah yang diperbarui secara berkala dengan informasi terbaru sangat membantu investor dalam

mempersiapkan dokumen dan memahami seluruh proses sebelum mereka mengajukan aplikasi. Hal ini tidak hanya mengurangi ketidakpastian tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dalam aplikasi.

Selain menyediakan informasi dasar, sistem informasi berbasis web juga memungkinkan adanya interaksi langsung antara investor dan pemerintah. Melalui fitur seperti chat langsung, forum diskusi, dan FAQ yang komprehensif, investor dapat dengan cepat mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Ini adalah langkah maju dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan efisien. Menurut sebuah penelitian oleh UNCTAD (2021), negara-negara yang mengadopsi sistem informasi berbasis web untuk layanan publik mencatat peningkatan kepuasan pengguna hingga 25%, menunjukkan pentingnya kemudahan akses informasi dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.

Lebih jauh lagi, sistem informasi yang transparan dan mudah diakses juga dapat meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi investor asing. Dengan informasi yang jelas dan terstruktur, investor dapat lebih mudah membandingkan berbagai lokasi investasi dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Penelitian dari Deloitte (2020) mengungkapkan bahwa akses mudah terhadap informasi investasi dapat meningkatkan minat investor asing hingga 20%, karena mereka merasa lebih yakin dan siap dalam menghadapi proses perizinan dan operasional di negara tujuan investasi.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menyediakan informasi tambahan yang berguna bagi investor, seperti analisis pasar, tren industri, dan peluang investasi. Informasi ini dapat membantu investor dalam merencanakan strategi bisnis mereka dan membuat keputusan yang lebih tepat. Sebuah studi oleh PwC (2019) menemukan bahwa investor yang memiliki akses ke informasi pasar yang komprehensif

cenderung lebih berhasil dalam investasi mereka, dengan peningkatan return on investment (ROI) hingga 15%.

Untuk memastikan efektivitas sistem informasi ini, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala. Umpan balik dari pengguna harus diterima dan dipertimbangkan dalam pengembangan lebih lanjut dari sistem ini. Selain itu, perlindungan data dan privasi harus dijaga dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan investor. Dengan pendekatan yang komprehensif dan proaktif, sistem informasi berbasis web dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan Kepuasan Investor

Data terbaru menunjukkan bahwa sejumlah investor kini merasakan tingkat kepuasan yang lebih tinggi berkat pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan andal. Kemudahan dalam mengakses informasi serta komunikasi yang lebih baik dengan pejabat pemerintah juga menjadi faktor penting yang dihargai oleh para investor. Perubahan positif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem perizinan dan menarik lebih banyak investasi ke Papua.

Peningkatan kepuasan investor bukan hanya soal mempercepat proses perizinan, tetapi juga tentang memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien. Sistem pelayanan terpadu online memungkinkan investor untuk memantau perkembangan aplikasi mereka secara real-time, yang memberikan rasa aman dan transparansi yang lebih tinggi. Menurut penelitian oleh *World Bank* (2021), negara-negara yang mengimplementasikan layanan perizinan digital mencatat peningkatan kepuasan investor hingga 30%, menunjukkan betapa pentingnya kecepatan dan transparansi dalam menarik minat investor.

Selain itu, kemudahan akses informasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepuasan investor. Situs web yang diperbarui secara berkala dengan informasi terbaru tentang kebijakan, prosedur, dan persyaratan investasi membantu investor mempersiapkan dokumen dengan lebih baik dan memahami proses perizinan dengan lebih jelas. Penelitian dari McKinsey & Company (2020) menunjukkan bahwa akses informasi yang mudah dan cepat dapat mengurangi ketidakpastian dan kesalahan dalam aplikasi, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan kepuasan investor.

Interaksi yang lebih baik antara investor dan pejabat pemerintah juga menjadi faktor penentu dalam peningkatan kepuasan. Sistem yang memungkinkan komunikasi langsung melalui chat atau forum diskusi memberikan solusi cepat atas pertanyaan dan masalah yang dihadapi investor. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian masalah tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara investor dan pemerintah. Sebuah studi oleh *Harvard Business Review* (2021) mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah dan investor dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas investor, yang sangat penting untuk keberlanjutan investasi jangka panjang.

Pemerintah Papua perlu terus meningkatkan sistem dan layanan yang ada untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan investor. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas pegawai, pembaruan teknologi, serta penerapan umpan balik yang konstruktif dari para investor. Dengan demikian, Papua bisa menjadi tujuan investasi yang lebih menarik, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi teknologi informasi yang canggih dan responsif terhadap kebutuhan investor akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

Tantangan dan Hambatan

Meskipun manfaat dari penerapan teknologi informasi dalam proses perizinan sangat signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Banyak daerah di Papua masih menghadapi keterbatasan akses internet dan listrik yang stabil, yang menghambat implementasi penuh dari sistem pelayanan terpadu online. Tanpa infrastruktur yang memadai, efektivitas teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan tidak dapat tercapai secara optimal.

Selain infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pegawai pemerintah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan sistem digital yang kompleks. Pelatihan intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pegawai mampu memanfaatkan teknologi ini dengan maksimal. Menurut studi oleh OECD (2020), pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi hingga 40%.

Resistensi terhadap perubahan di kalangan pejabat pemerintah juga merupakan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Perubahan menuju sistem yang lebih digital dan transparan sering kali menghadapi penolakan, terutama dari mereka yang sudah terbiasa dengan cara kerja konvensional. Penolakan ini bisa berakar pada ketakutan akan perubahan, kekhawatiran kehilangan kontrol, atau bahkan karena adanya kepentingan tertentu yang terganggu. Sebuah penelitian oleh *Harvard Business Review* (2019) menunjukkan bahwa manajemen perubahan yang efektif, termasuk komunikasi yang jelas dan partisipasi aktif dari semua

pemangku kepentingan, sangat penting untuk mengatasi resistensi ini.

Selain itu, masalah keamanan data menjadi perhatian utama dalam implementasi teknologi informasi. Penggunaan sistem digital meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber, yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan investor. Perlindungan data yang kuat harus menjadi prioritas, dengan penerapan teknologi keamanan terkini dan kebijakan perlindungan data yang ketat. Studi dari *International Data Corporation (IDC)* (2021) menunjukkan bahwa investasi dalam keamanan siber yang memadai dapat mengurangi insiden pelanggaran data hingga 50%.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Pemerintah harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, meningkatkan keterampilan pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, mengelola perubahan dengan strategi yang efektif, dan memastikan perlindungan data yang ketat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Papua dapat mengoptimalkan manfaat dari teknologi informasi dalam proses perizinan, menarik lebih banyak investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..

Rekomendasi untuk Perbaikan

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberlanjutan program ini. Pertama, perlu adanya investasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus sangat penting. Ketiga, diperlukan kebijakan yang mendukung keamanan data dan perlindungan privasi untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.

Temuan penelitian ini membuka jalan bagi langkah-langkah strategis untuk

mengatasi berbagai tantangan dan memastikan keberlanjutan program di masa depan. Berikut beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan:

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi yang Adaptif dan Merata

a) Memperluas jangkauan konektivitas
Investasi masif dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, sangatlah krusial. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun menara seluler baru, memperluas jaringan fiber optik, dan menyediakan akses internet satelit yang terjangkau.

b) Penerapan teknologi tepat guna
Implementasi teknologi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal menjadi kunci. Solusi teknologi seperti komputasi awan, internet of things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.

c) Pengembangan platform digital yang ramah pengguna
Membangun *platform* digital yang mudah diakses dan digunakan oleh semua pihak, termasuk masyarakat awam, sangatlah penting. Platform ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi, portal layanan, dan ruang kolaborasi untuk mendukung keberhasilan program.

2. Pemberdayaan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul

a) Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan menjadi esensial. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan teknis, soft skills, dan pengetahuan khusus terkait program.

b) Membangun budaya belajar yang kondusif

Menciptakan budaya belajar yang kondusif di semua tingkatan, baik bagi staf program maupun masyarakat penerima manfaat, sangatlah penting. Budaya ini dapat diwujudkan dengan menyediakan akses ke bahan belajar yang berkualitas, mendorong partisipasi dalam forum diskusi, dan memfasilitasi pembelajaran antar individu.

c) Menarik dan mempertahankan talenta terbaik

Untuk memastikan keberhasilan program jangka panjang, diperlukan strategi untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam tim. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan gaji dan benefit yang kompetitif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan memberikan kesempatan pengembangan karir yang jelas.

3. Membangun Kepercayaan Pengguna melalui Keamanan Data dan Perlindungan Privasi

a) Menerapkan kebijakan keamanan data yang kuat

Implementasi kebijakan keamanan data yang kuat dan komprehensif sangatlah penting untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Kebijakan ini harus selaras dengan regulasi yang berlaku dan transparan bagi semua pihak.

b) Memastikan perlindungan privasi yang ketat

Perlindungan privasi pengguna harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kontrol akses data yang ketat, menerapkan enkripsi data, dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan.

c) Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan

Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan pengguna sangatlah penting untuk membangun kepercayaan.

Pengguna harus diinformasikan tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, program ini dapat mengatasi berbagai tantangan dan menuju keberlanjutan jangka panjang. Investasi dalam infrastruktur teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pembangunan kepercayaan pengguna merupakan kunci untuk mencapai tujuan program dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa rekomendasi ini hanyalah sebuah kerangka awal dan perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik program. Diperlukan kajian dan analisis yang lebih mendalam untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif dalam mencapai tujuan program.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi teknologi informasi sangat efektif dalam mempercepat *good governance* dalam pelayanan investasi di Papua. Dengan terus memperbaiki infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia, serta mengatasi tantangan yang ada, diharapkan Papua dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

REFERENSI

- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Deloitte. (2020). *Digital Transformation in Public Sector: Enhancing Investor Attraction*. Deloitte Insights.
- Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., & Williams, M. D. (2019). Re-examining the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): Towards a Revised Theoretical Model. *Information Systems Frontiers*, 21(3), 719-734.

- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Harvard Business Review. (2019). *Managing Change in the Public Sector: Overcoming Resistance and Building Trust*. Harvard Business Review.
- Harvard Business Review. (2021). *Digital Transformation in Government: The Role of Human Capital*. Harvard Business Review.
- Harvard Business Review. (2021). *Effective Communication in Public Services: Building Investor Trust*. Harvard Business Review.
- Harvard Kennedy School. (2021). *Effective Public Communication for E-Government Initiatives*. Harvard Kennedy School Publications.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. London: Sage Publications.
- International Data Corporation (IDC). (2021). *Cybersecurity in the Digital Era: Strategies for Protecting Public Sector Data*. IDC Research Reports.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). *Developing fully functional E-government: A four-stage model*. *Government Information Quarterly*, 18(2).
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing Qualitative Research* (6th ed.). Sage Publications, San Francisco, CA: Thousand Oaks.
- McKinsey & Company. (2019). *The Impact of Digital Transformation on Investment Climate*. McKinsey Global Institute.
- McKinsey & Company. (2020). *The Role of Information Accessibility in Investment Efficiency*. McKinsey Global Institute.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2018). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Moon, M. J. (2022). *The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality?* *Public Administration Review*, 62(4), 424-433.
- Norris, D. F., & Reddick, C. G. (2023). *Local E-Government in the United States: Transformation or Incremental Change?* *Public Administration Review*, 73(1), 165-175.
- OECD. (2019). *Digital Government Strategies for Transforming Public Services in the Welfare Areas*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Digital Government Skills and Capabilities: Building a Future-Ready Public Service*. OECD Publishing.
- PwC. (2019). *Market Analysis and Investor Decision-Making*. PwC Research Reports.
- Rose, J., Flak, L. S., & Sæbø, Ø. (2018). *Stakeholder Theory for the E-Government Context: Framing a Value-Oriented Theory*. *Government Information Quarterly*, 35(3), 362-374.
- Tantri, A. (2022). *Integrated Information Systems in Investment Services: Case Study of Indonesian Regions*. *Journal of Regional Development*, 15(4), 311-330.
- Transparency International. (2020). *Digital Governance and Corruption Prevention*. Transparency International Publications.
- UNCTAD. (2021). *Digital Government and Investment Climate*. United Nations Conference on Trade and Development Publications.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2016). *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: A Synthesis and the Road Ahead*. *Journal of the*



Association for Information Systems,
17(5), 328-376.

West, D. M. (2023). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15-27.

World Bank. (2020). *The Impact of E-Government on Foreign Direct Investment: Evidence from Developing Countries*. World Bank Publications.

World Bank. (2021). *Digital Government Services and Investor Satisfaction*. World Bank Publications.

World Economic Forum. (2018). *Public-Private Cooperation in Digital Governance*. World Economic Forum White Papers.